

## PERAN KPU KOTA MAKASSAR DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA

Irsyad Dhahri<sup>1</sup>, Herman<sup>2</sup>, Nur Aisyah Jamaluddin<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>irsyad.dhahri@unm.ac.id, <sup>2</sup>herman7403@unm.ac.id

<sup>3</sup>Nuraisyah Jamaluddin

**Abstract:** *This research aims to determine: (1) The role of the Makassar City KPU in carrying out activities to increase community participation to encourage the public to participate in the 2020 Pilkada, (2) The obstacles that the Makassar City KPU faces in carrying out activities to increase community participation to encourage the public to participate in the 2020 Pilkada. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews and documentation using research instruments in the form of interview guidelines as documentation tools. Triangulation is used as a data checking procedure. As well as using data reduction, data presentation and drawing conclusions as data analysis techniques. The results of this research prove that (1) the Makassar KPU has carried out activities to increase community participation that are very proactive and committed to encouraging the community to participate in the regional elections through intensive socialization, maximizing the work of the PPK, PPS, PPDP chain and establishing collaboration with various communities and community groups. , local government, and schools as well as the KPU collaborated with two well-known Makassar influencers Tumming-Abu. The KPU also evaluates and monitors efforts to encourage community participation in regional elections. (2) The obstacles faced, namely, community political awareness, selectivity in choosing associations, permits and involvement of other agencies are obstacles and the risk of negative stigma or negative assumptions.*

**Keywords:** *Makassar KPU, Community Participation, Pilkada*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran KPU Kota Makassar dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi pada Pilkada, (2) Kendala yang KPU Kota Makassar hadapi dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi pada Pilkada. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara alat dokumentasi. Adapun triangulasi digunakan sebagai prosedur pengecekan data. Serta menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisi data. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) KPU makassar telah melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang sangat proaktif dan berkomitmen dalam mendorong masyarakat berpartisipasi pada pilkada dengan melalui sosialisasi secara intensif, memaksimalkan kerja rantai PPK, PPS, PPDP dan menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas, kelompok masyarakat, pemerintah setempat, dan sekolah serta KPU menggandeng dua influencer kenamaan Makassar Tumming-Abu sebagai brand ambassador KPU Makassar. KPU juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pilkada. (2) Kendala yang dihadapi yaitu , kesadaran politik masyarakat, selektivitas dalam memilih perkumpulan, izin dan keterlibatan instansi lain menjadi kendala dan risiko stigma negatif atau asumsi negatif.

**Kata Kunci:** KPU Kota Makassar, Partisipasi Masyarakat, Pilkada

## PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertugas meningkatkan kualitas para pemilih dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.<sup>1</sup> Lebih lanjut mengenai KPU, diketahui bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU, tercantum dalam Pasal 22 E Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.<sup>2</sup>

Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota Makassar juga merupakan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020 dan diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan sarana untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, yaitu memilih Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Kota Makassar memiliki wewenang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tercantum pada Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota yang menyatakan bahwa “melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat”<sup>3</sup>

Berdasarkan data KPU Kota Makassar pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tingkat partisipasi masyarakat mencapai sekitar 58,9%, atau sekitar 584.406 pemilih dari total 1.021.714 Daftar Pemilih Tetap (DPT).<sup>4</sup> Sedangkan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tingkat partisipasi mencapai sekitar 59,6%, atau sekitar 597.585 pemilih dari total 901.087 DPT.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar dalam pemilihan umum walikota Makassar mengalami peningkatan sebanyak 13.179 jiwa. Namun belum mencapai angka nasional yang ditarget sebesar 77,5% oleh KPU Kota Makassar

Upaya KPU Kota Makassar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menekan angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun masih ada masyarakat melakukan tindakan golput, sehingga KPU perlu meminimalisir agar tidak terjadi di periode selanjutnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kasim mengenai strategi pemanfaatan media komunikasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih oleh komisi pemilihan umum kota makassar pada pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi covid-19. Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa KPU Kota Makassar memanfaatkan media massa (radio, televisi dan surat kabar) dan media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube) karena merupakan media yang mudah diakses oleh masyarakat dan mengikuti perkembangan era digital serta jang-

---

<sup>1</sup>Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan. dan Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 79.

<sup>2</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup>Pasal 26 ayat (2) huruf b PKPU No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan

---

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

<sup>4</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_wali\\_kota\\_Makassar\\_2018](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_wali_kota_Makassar_2018)

<sup>5</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_wali\\_kota\\_Makassar\\_2020](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_wali_kota_Makassar_2020)

kauan penyebaran informasinya lebih luas. Melalui strategi pemanfaatan media komunikasi yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, KPU Kota Makassar dapat memaksimalkan pelaksanaan tahapan sosialisasi pada masa pandemi sehingga meningkatkan minat pemilih untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2020.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peran KPU Kota Makassar Dalam Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Mendorong Masyarakat Berpartisipasi Pada Pilkada di Kota Makassar (Analisis dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar Tahun 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala kejadian secara sistematis, akurat dan fakta mengenai sifat-sifat populasi daerah tertentu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

---

<sup>6</sup>Kasim, S. P. (2022). Analisis strategi pemanfaatan media komunikasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih oleh komisi pemilihan umum kota makassar pada pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran KPU Kota Makassar dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi pada pilkada 2020.**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah yang aktif dan komprehensif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) era digital. Mereka menjalankan berbagai strategi efektif untuk mencapai tujuan ini, yang mencakup berbagai aspek sosialisasi, penyuluhan, dan penggunaan berbagai media komunikasi. Salah satu poin penting adalah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat secara intensif. KPU Kota Makassar telah mengadakan berbagai kegiatan seperti pertemuan tatap muka, kunjungan langsung ke berbagai lokasi di wilayah Kota Makassar, dan menggunakan berbagai metode komunikasi yang relevan. Dalam era digital, KPU Kota Makassar juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok untuk mencapai berbagai segmen masyarakat. Selain itu, mereka juga menggunakan media luar ruang seperti baliho dan spanduk untuk memperluas jangkauan pesan mereka.

Pendekatan yang diambil oleh KPU Kota Makassar ini sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Pasal ini menekankan pentingnya KPU untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Tindakan KPU Kota Makassar sesuai dengan peraturan ini dan membuktikan komitmen

tugasnya.<sup>7</sup> Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Rappocini bahwa memang benar adanya KPU Kota Makassar beserta adhoc memanfaatkan media teknologi, seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok untuk melakukan sosialisasi dan memberikan paparan informasi terkait dengan pemilihan yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Makassar telah berhasil mengimplementasikan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam Pilkada era digital. Hal ini penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pemilihan kepemimpinan lokal

Dalam konteks penelitian ini, perlu dicatat bahwa KPU Kota Makassar telah memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap upaya peningkatan partisipasi pemilih, terutama dari segmen pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, dan kelompok masyarakat yang beragam. Kolaborasi aktif dengan berbagai komunitas, kelompok strategis, sekolah, kelurahan, dan pemerintah setempat menjadi bagian integral dari strategi mereka serta menggandeng dua influencer kenamaan Makassar yaitu Tumming-Abu sebagai *brand ambassador* KPU Kota Makassar dengan video kreatif. Selain itu, KPU juga menjalankan evaluasi dan monitoring rutin terhadap efektivitas upaya mereka dalam mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mencatat bahwa masyarakat telah merasakan upaya nyata dari KPU dan kelompok adhoc dalam melakukan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya menggunakan hak pilih dan mencegah penyebaran informasi

---

<sup>7</sup>Purwadi et al., "Election of Regional Heads in the Perspective of State Administration: Direct Election Versus Election of Representatives."

yang tidak benar (hoaks). Sosialisasi ini telah melibatkan berbagai tempat-tempat umum yang menjadi sasaran dari berbagai kelompok pemilih, termasuk pemilih muda, pemilih perempuan, dan pemilih lama.

Seperti yang disebutkan oleh Kodiyat, partisipasi masyarakat dalam pemilihan memiliki dampak yang signifikan pada proses politik dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya memengaruhi pemilihan calon pemimpin, tetapi juga arah kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah di masa depan.

Terlebih lagi, pendekatan yang diambil oleh KPU Kota Makassar sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Brym, di mana peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih merupakan hasil dari proses interaksi sosial. Dalam proses ini, individu memiliki kemampuan untuk mengambil posisi orang lain dan memahami perspektif mereka, yang menjadi landasan bagi sosialisasi yang efektif dan mencegah penyebaran informasi yang tidak benar.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menggambarkan peran penting KPU Kota Makassar dalam membangun kesadaran pemilih dan memperkuat proses demokrasi di wilayah ini.

Seluruh langkah yang diambil oleh KPU Kota Makassar, yang mencerminkan komitmen mereka dalam memastikan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses pemilihan, merupakan suatu kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan partisipasi masyarakat dalam era digital, terutama dalam Pilkada. KPU Kota Makassar telah

---

<sup>8</sup>Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

<sup>9</sup>Brym, Robert J., and John Lie. *Sociology: Your Compass for a New World*. Wadsworth Publishing, 2018.

berperan sebagai agen perubahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi yang modern, dengan berfokus pada penerapan teknologi dan strategi berbasis digital yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar dapat dilihat sebagai implementasi dari teori peran sosial yang dikemukakan oleh Croteau. Teori ini mengakui bahwa peran sosial seseorang dalam masyarakat, seperti peran sebagai seorang anak, orang tua, siswa, pegawai, atau pemimpin, dapat berdampak pada tingkat partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan. Dalam konteks ini, KPU Kota Makassar telah berfungsi sebagai pemimpin dan fasilitator untuk mengaktifkan peran sosial masyarakat dalam proses pemilihan, dengan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif melalui inovasi teknologi dan upaya strategis lainnya.<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian ini, peran KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilihan memiliki implikasi yang kuat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Keberhasilan implementasi strategi komprehensif KPU Kota Makassar dalam menghadapi tantangan partisipasi masyarakat, khususnya dalam lingkungan digital, menunjukkan bahwa lembaga ini telah berhasil menjadi peran kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mengawal proses pemilihan secara efektif.

Penggunaan teknologi dan pendekatan yang diadopsi oleh KPU Kota Makassar sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin digital. Ini merupakan langkah progresif dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam era digital, dan sekaligus menegaskan pentingnya peran institusi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat

dalam proses pemilihan. Dengan demikian, kontribusi KPU Kota Makassar telah menjadi contoh terbaik dalam mengatasi tantangan partisipasi masyarakat dalam era digital, dan hasilnya dapat dijadikan referensi bagi upaya serupa di berbagai daerah lainnya

Pengembangan tersebut menghubungkan pemahaman teoritis (teori peran sosial oleh Croteau) dengan hasil penelitian yang menyatakan kontribusi penting KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, terutama dalam konteks digital.

## **B. Kendala yang dihadapi KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020**

Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu kendala utama yang signifikan dalam partisipasi politik masyarakat adalah kurangnya kesadaran politik. Meskipun sudah ada upaya sosialisasi yang dilakukan, tidak semua anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pemilihan. Mereka merasa bahwa kesadaran politik bukan sesuatu yang dapat terbentuk dengan cepat; sebaliknya, itu memerlukan waktu dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik. Ini sejalan dengan pendapat Butarbutar yang menyatakan bahwa partisipasi apatis, yaitu ketidakminatan seseorang terhadap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah, seringkali muncul ketika individu merasa kecewa terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada. Dengan kata lain, apabila tingkat kesadaran politik rendah dan kepercayaan kepada pemerintah minim, maka partisipasi politik cenderung bersifat pasif atau bahkan tertekan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Butarbutar, R. F., Jendrius, J., & Ariany, R. (2019). Program Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Masyarakat Dan Regulasi Yang Mengaturnya Dan Malpraktik Dalam Pelaksanaannya. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 358-373.

---

<sup>10</sup>Croteau, David, and William Hoynes. *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*. Sage Publications, 2019.

Hasil penelitian ini menekankan pentingnya melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan konsisten guna meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Sosialisasi harus dirancang dengan cermat untuk membantu masyarakat memahami peran mereka dalam proses politik, membangkitkan minat mereka dalam urusan pemerintahan, dan mendorong keterlibatan aktif dalam pemilihan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang program sosialisasi yang lebih efektif, terutama dalam mengatasi kendala kesadaran politik yang merupakan penghalang signifikan bagi partisipasi politik yang lebih aktif.

Kendala selanjutnya yakni masalah selektivitas dalam memilih tempat atau perkumpulan untuk kegiatan sosialisasi politik dalam konteks pemilihan. Para responden menekankan pentingnya berhati-hati dalam menentukan lokasi sosialisasi, karena ini memiliki dampak besar pada cara pesan politik disampaikan kepada pemilih potensial. Mereka menyadari bahwa pemilihan yang tepat dapat memengaruhi bagaimana individu memandang calon-calon yang bersaing dalam pemilihan tersebut. Selain pertimbangan politik, aspek logistik juga menjadi perhatian. Beberapa responden menyoroti tantangan dalam mencapai pemilih di daerah-daerah terpencil atau dengan akses terbatas ke tempat-tempat sosialisasi yang strategis. Mereka berpendapat bahwa memastikan keterlibatan pemilih di seluruh spektrum geografis adalah elemen penting dalam menjaga integritas pemilihan.

Kendala ini juga berkaitan dengan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemilihan yang kompetitif, menjaga netralitas dan keadilan dalam proses menjadi semakin penting. Dengan memilih tempat sosialisasi dengan cermat, calon-calon dapat

membantu memastikan bahwa KPU tetap netral dan tidak memihak kepada satu calon tertentu.

Berkaitan dengan teori sosialisasi politik yang diusulkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, penting untuk dipahami bahwa proses sosialisasi politik bukan hanya tentang lokasi fisik, tetapi juga tentang interaksi sosial dan pengalaman yang membentuk pandangan politik individu. Oleh karena itu, pemilihan tempat sosialisasi menjadi elemen kunci dalam memengaruhi cara masyarakat memahami politik dan menginternalisasi identitas politik mereka.<sup>12</sup> Dalam konteks penelitian yang dilakukan, kendala selektivitas dalam memilih tempat sosialisasi mencerminkan pemahaman bahwa tempat dan perkumpulan yang dipilih dapat memengaruhi identitas politik individu serta pandangan mereka terhadap calon dan proses pemilihan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori sosialisasi politik yang menekankan peran interaksi sosial dalam membentuk pandangan politik individu.

Terakhir, kendala yang diungkapkan adalah risiko stigma negatif atau asumsi negatif. Beberapa keluhan khawatir bahwa turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi akan menimbulkan stigma negatif atau asumsi negatif bahwa mereka berkolusi dengan calon tertentu. Untuk mengatasi hal ini, mereka perlu menjadi lebih selektif dalam memilih tempat sosialisasi dan memastikan transparansi dalam tujuan mereka. Dalam konsep sosialisasi politik yang dikemukakan oleh Gaffar dan Afan mengacu pada proses di mana individu dan kelompok masyarakat memahami, mempelajari, dan berpartisipasi dalam proses politik.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian yang dilakukan, ketakutan kelura-

---

<sup>12</sup>Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>13</sup>Gaffar, Afan. 2007. "Politik Indonesia". Yogyakarta: Pustaka Pelajar

han tentang timbulnya asumsi negatif dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan sosialisasi politik. Ketika masyarakat mengasosiasikan upaya sosialisasi dengan potensi kolusi atau bias, hal ini dapat menghambat proses sosialisasi politik yang efektif. Untuk mengatasi ini, perlu adanya transparansi dalam tujuan sosialisasi dan komunikasi yang jelas untuk menghindari asumsi negatif.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kendala-kendala ini berkaitan dengan aspek komunikasi, aksesibilitas, dan kesadaran politik. Dalam konteks ini, upaya yang tepat dalam meningkatkan informasi, intensitas sosialisasi, selektivitas dalam memilih tempat sosialisasi, serta manajemen izin dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini. Selain itu, perlu ditekankan bahwa memahami dan mengatasi kendala-kendala ini merupakan langkah penting dalam memperbaiki efektivitas KPU Makassar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mendorong partisipasi dalam pilkada era digital. Data ini juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih konkret dan efisien guna mencapai tujuan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPU Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang sangat proaktif dan berkomitmen dalam mendorong masyarakat berpartisipasi pada pilkada 2020. Pertama, KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi secara intensif dengan berbagai metode dan media yang relevan, termasuk media sosial, pertemuan tatap muka, dan kunjungan langsung ke berbagai lokasi di wilayah Kota Makassar. Mereka juga memanfaatkan berbagai platform media

teknologi, seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok, serta media luar ruang seperti baliho dan spanduk, untuk mencapai berbagai segmen masyarakat. Kedua, KPU Kota Makassar menjalin kolaborasi dengan berbagai komunitas, kelompok strategis, sekolah, kelurahan, dan pemerintah setempat serta menggandeng dua influencer kenamaan Makassar yakni Tumming-Abu sebagai Ambassador KPU Makassar. Mereka secara aktif berupaya mencapai pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, dan kelompok masyarakat yang beragam. Kolaborasi ini memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Selain itu, KPU Kota Makassar juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap upaya mereka dalam mendorong partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memahami efektivitas strategi mereka dan berusaha untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan mereka.

2. KPU Kota Makassar menghadapi kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pilkada era digital, termasuk kesadaran politik, selektivitas tempat sosialisasi, izin, dan stigma negatif. Kesadaran politik masyarakat adalah masalah utama, yang memerlukan upaya intensif untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota mendatang. Selektivitas lokasi sosialisasi dan masalah izin memerlukan manajemen yang efektif. Untuk mengatasi risiko stigma negatif, perlu selektivitas dalam memilih lokasi. Dalam keseluruhan, upaya untuk meningkatkan informasi dan intensitas sosialisasi, selektivitas dalam memilih lokasi, serta manajemen izin dapat mem-

bantu KPU Makassar menyampaikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pilkada era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 2013.
- Bawaslu. “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dalam Satu Naskah” 53, no. 9 (2010):1689–1699. <http://arxiv.org/abs/1011.1669%0> [Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201](http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201).
- Eva Fauzia. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal MODERAT* 5, no. 9 (2019): 191–200.
- Hardianto, Willy Tri, Aditya Peten Sili, and Firman Firdausi. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kpu Kota Batu).” *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2022): 144–151. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_wali\\_kota\\_Makassar\\_2018](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_wali_kota_Makassar_2018)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_wali\\_kota\\_Makassar\\_2020](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_wali_kota_Makassar_2020)
- <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>. Diakses pada tanggal 21 April 2023
- KPU Makassar gelar pendidikan politik di wilayah partisipasi pemilih rendah. ANTARASULSEL. Minggu, 13 Juni 2021
- Maria, Linlin, and Dion Mahendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Vol. 10. KPU Kota Bogor, 2020. [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_artikel/Buku\\_Pintar\\_Pemilu\\_dan\\_Demokrasi.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku_Pintar_Pemilu_dan_Demokrasi.pdf).
- Marwan, A. “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013.” *Legislasi Indonesia* 2013, no. 97 (2018): 227–234.
- Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, edisi ke IX) 2013. Hal 368
- Prakoso, Cathas Teguh, and Santi Rande. “Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula.” *eJournal Administarsi Publik* 8, no. 4 (2020): 4595–4607.
- Prayogo, R T. “Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Islam (the Concept of Head Regional Election in Indonesia in ....” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2018): 1–34. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/370/252>.
- Purwadi, Wira, Kata Kunci, : Pemilihan, Kepala Daerah, Pemilihan Langsung, and Pemilihan Perwakilan. “Election of Regional Heads in the Perspective of State Administration: Direct Election Versus Election of Representatives.” *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019):78–89. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/4470>.
- Rasdiyanah. Sosialisasi di Daerah Partisipasi Rendah, KPU Makassar: Hoax dan Money Politics harus Disaring.PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR. Jumat, 02 September 2022.
- Seran, Gotfridus Goris. “Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada



- Langsung Serentak Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 655.
- Sugiyono. *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by CV.Afabeta. Bandung, 2017.
- Widhiastini, Ni Wayan, Nyoman Sri Subawa, Nyoman Sedana, and Ni Putu Intan Permatasari. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali.” *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 1.
- Wiredarme. *Konfigurasi Politik: Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia*, 2019.
- Wisnumurti, Desak Putu Adistyana-ningsih dan Anak Agung Gede Oka. “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10 (2019): 60–64. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa/article/view/1531>.